



Jurnal Abmas

Media Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://ejournal.upi.edu/index.php/ABMAS>



Optimizing the role of Puskesmas-SLRT facilitators through capacity building training

M. Maulana¹, Encep Sudirjo², Dadan Nugraha³, Enjang Yusup Ali⁴, Heri Ridwan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

maulana@upi.edu¹

ABSTRACT

The Social Welfare Center-Integrated Service and Referral System (Puskesmas-SLRT) is a community-based institution designed to improve access to social welfare services for poor and vulnerable populations at the village and sub-district levels. In practice, the implementation of Puskesmas-SLRT services has encountered major challenges, particularly the limited capacity of facilitators in managerial skills, social service delivery, and social data management. Therefore, this community service program aimed to enhance the capacity of Puskesmas-SLRT facilitators in Sumedang Regency to enable them to perform their roles more effectively. The program was implemented through structured training, continuous mentoring, and capacity-building activities involving facilitators from 277 villages and sub-districts. The evaluation of capacity improvement was conducted using a descriptive qualitative approach through observation, reflective discussions, and assessments of facilitators' understanding of their roles and service functions before and after the program. The results indicate an improvement in facilitators' understanding of social welfare service management, increased responsiveness to community needs, and strengthened coordination with local government institutions. Overall, this community service activity contributed to optimizing the role of Puskesmas-SLRT facilitators in delivering more effective and integrated social welfare services at the local level

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 14 Oct 2025

Revised: 5 Feb 2026

Accepted: 12 Feb 2026

Publish online: 24 Feb 2026

Keywords:

facilitator; HR capacity building;
social welfare center

Open access 
Jurnal Abmas
is a peer-reviewed open-access journal

ABSTRAK

Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesmas-SLRT) merupakan lembaga berbasis masyarakat yang berperan dalam mendekatkan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam praktiknya, pelaksanaan layanan Puskesmas-SLRT masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia fasilitator, khususnya pada aspek manajerial, keterampilan pelayanan sosial, dan pengelolaan data. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT di Kabupaten Sumedang agar mampu menjalankan perannya secara lebih optimal. Pengabdian dilaksanakan melalui pelatihan terstruktur, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan yang melibatkan fasilitator dari 277 desa dan kelurahan. Metode evaluasi peningkatan kapasitas fasilitator dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi, diskusi reflektif, serta evaluasi pemahaman terhadap tugas dan fungsi layanan sebelum dan setelah kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman fasilitator terhadap manajemen layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya responsivitas dalam menangani kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada optimalisasi peran fasilitator Puskesmas-SLRT dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan terpadu di tingkat lokal.

Kata Kunci: fasilitator; peningkatan kapasitas SDM; pusat kesejahteraan sosial

How to cite (APA Style)

Maulana, M., Sudirjo, E., Nugraha, D., Ali, E. Y., & Ridwan, H. (2026). Optimizing the role of Puskesmas-SLRT facilitators through capacity building training. *Jurnal Abmas*, 26(1), 51-62.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



Copyright

2026, M. Maulana, Encep Sudirjo, Dadan Nugraha, Enjang Yusup Ali, Heri Ridwan. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: maulana@upi.edu

INTRODUCTION

Sejak diimplementasikan pada tahun 2016, Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesmas-SLRT) dirancang sebagai instrumen integrasi layanan kesejahteraan sosial hingga tingkat desa dan kelurahan. Namun, dalam konteks Kabupaten Sumedang, efektivitas Puskesmas-SLRT masih menghadapi sejumlah tantangan. Data Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa meskipun Puskesmas telah terbentuk di sebagian besar desa/kelurahan, pemanfaatannya oleh masyarakat miskin dan rentan belum optimal, terutama dalam hal rujukan layanan terpadu dan pembaruan data kesejahteraan sosial. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan pemahaman pelaksana terhadap mekanisme layanan satu pintu masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah sosial secara komprehensif (Wirata *et al.*, 2026). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan Puskesmas-SLRT dan praktik implementasinya di tingkat lokal, sehingga diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas, integrasi layanan, dan optimalisasi peran Puskesmas-SLRT di Kabupaten Sumedang

Secara konseptual, Puskesmas-SLRT merupakan lembaga berbasis wilayah yang berperan menjangkau warga fakir miskin dan kelompok rentan melalui mekanisme pengaduan, pendataan, serta rujukan program bantuan sosial. Layanan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penanganan atas kebutuhan sosialnya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, Puskesmas-SLRT juga berfungsi sebagai basis data pengaduan kesejahteraan sosial serta perantara distribusi bantuan pemerintah ke daerah-daerah secara lebih adil dan merata (Salsadila & Irman, 2025).

Berbagai kajian dan praktik pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas Puskesmas-SLRT sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, khususnya fasilitator di tingkat desa dan kelurahan (Rusli *et al.*, 2023). Fasilitator berperan sebagai ujung tombak layanan dalam mengelola pengaduan, melakukan pendataan, serta menghubungkan masyarakat dengan program bantuan yang relevan. Namun demikian, dalam tataran implementasi, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi peran tersebut, antara lain keterbatasan pemahaman manajemen organisasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta jejaring kerja yang belum optimal (Aritonang & Trimurni, 2024; Rahayu *et al.*, 2025).

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
• Wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat • Basis data aduan kesejahteraan sosial masyarakat • Corong program kerja pemerintah daerah dan perantara bantuan • Sarana sinergi dan kemitraan antarorganisasi masyarakat dan pemangku kepentingan	• Pemahaman dan implementasi manajemen organisasi yang masih terbatas • Kapasitas sumber daya manusia fasilitator yang belum optimal • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung • Jejaring kerja yang masih terbatas
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
• Peningkatan manajemen organisasi menuju kelembagaan yang lebih berkembang • Penguatan kapasitas SDM yang mendorong inovasi layanan • Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung potensi masyarakat • Perluasan jejaring kerja dan kemitraan lintas sektor	• Stagnasi kelembagaan akibat lemahnya manajemen organisasi • Rendahnya kapasitas SDM sebagai hambatan peningkatan layanan • Keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat pengembangan potensi • Jejaring kerja yang sempit membatasi akses informasi dan kemitraan

Gambar 1. Analisis SWOT Puskesmas-SLRT Kabupaten Sumedang
Sumber: Rekontruksi Penulis 2025

Berdasarkan analisis SWOT pada **Gambar 1** terhadap Puskesmas-SLRT di Kabupaten Sumedang, teridentifikasi adanya kesenjangan antara potensi kelembagaan dan kemampuan aktual fasilitator dalam menjalankan tugasnya. Kelemahan pada aspek manajerial dan kapasitas sumber daya manusia berpotensi menghambat keberlanjutan dan efektivitas layanan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk penguatan kapasitas fasilitator.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan skema peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT berbasis siklus berkelanjutan, yang berbeda dari program pendampingan sebelumnya yang umumnya bersifat satu kali pelatihan (*one-off training*) dan fokus pada aspek administratif. Kegiatan ini mengintegrasikan tiga elemen utama secara simultan, yaitu: penguatan manajemen organisasi Puskesmas melalui pendampingan perencanaan layanan dan pembagian peran kerja; peningkatan keterampilan pelayanan sosial fasilitator berbasis studi kasus riil kemiskinan dan kerentanan di Kabupaten Sumedang; serta pengembangan jejaring kerja lintas sektor melalui mekanisme rujukan dan koordinasi yang diuji langsung dalam praktik layanan. Selain itu, aspek keberlanjutan diwujudkan melalui penyusunan modul kerja dan mekanisme monitoring internal Puskesmas, sehingga peningkatan kapasitas tidak berhenti pada individu fasilitator, tetapi terinstitusionalisasi dalam tata kelola Puskesmas-SLRT di tingkat desa dan kelurahan.

Literature Review

Konsep Puskesmas-SLRT dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Puskesmas-SLRT merupakan instrumen layanan kesejahteraan sosial di tingkat lokal yang dirancang untuk mendekatkan akses layanan bagi masyarakat miskin dan rentan. Puskesmas-SLRT berfungsi sebagai pusat layanan berbasis wilayah yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial melalui mekanisme pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses (Aminudin *et al.*, 2025). Dalam praktiknya, efektivitas Puskesmas-SLRT sebagai *single window service* sangat ditentukan oleh peran fasilitator sebagai pelaksana layanan di tingkat desa dan kelurahan. Fasilitator berperan dalam menerima dan mengelola aduan, melakukan asesmen permasalahan sosial, serta mengoordinasikan proses rujukan lintas sektor (Murni & Setiawan, 2022). Oleh karena itu, kapasitas fasilitator dalam aspek pelayanan sosial, koordinasi kelembagaan, dan pengelolaan jejaring layanan menjadi faktor kunci dalam memastikan Puskesmas-SLRT berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran Fasilitator dalam Puskesmas-SLRT

Fasilitator Puskesmas-SLRT memegang peran kunci dalam operasional layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam menerima pengaduan, melakukan asesmen masalah sosial, serta mengoordinasikan rujukan layanan lintas sektor. Dalam praktiknya, fasilitator dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu memahami dinamika kemiskinan dan kerentanan masyarakat, mengelola alur layanan, serta membangun komunikasi efektif dengan perangkat desa dan instansi terkait (Laili, 2025). Keterbatasan kapasitas pada aspek-aspek tersebut sering kali menyebabkan layanan Puskesmas-SLRT belum berjalan optimal.

Temuan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi fasilitator dalam manajemen organisasi, pemanfaatan sistem layanan terpadu, dan koordinasi jejaring berdampak langsung pada kualitas pelayanan sosial (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan fasilitator Puskesmas-SLRT bukan sekadar pelatihan konseptual, melainkan peningkatan kapasitas yang bersifat praktis dan kontekstual, sesuai dengan permasalahan riil di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator yang berorientasi pada praktik pelayanan dan pengelolaan kelembagaan menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan dan efektivitas Puskesmas-SLRT.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengabdian Masyarakat

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) merupakan konsep penting dalam pengabdian kepada masyarakat, terutama pada lembaga pelayanan sosial berbasis komunitas. *Capacity building* tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga penguatan sikap, nilai, serta sistem kelembagaan yang mendukung kinerja organisasi (Zubaidi & Syafakhorrahman, 2024). Pendekatan ini menekankan proses pembelajaran berkelanjutan agar individu dan organisasi mampu beradaptasi dengan dinamika permasalahan sosial.

Capacity building merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pembangunan dan pelayanan sosial (Abd Fatah, 2024). Dalam konteks Puskesmas-SLRT, peningkatan kapasitas fasilitator menjadi kunci dalam mengoptimalkan fungsi layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas respons terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan rentan (Nofriyanti & Mubarak, 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM memiliki relevansi yang tinggi dalam penguatan Puskesmas-SLRT.

Pelatihan dan Pendampingan sebagai Strategi Penguatan Kapasitas

Pelatihan dan pendampingan dipilih sebagai strategi utama dalam kegiatan pengabdian ini karena karakteristik tugas fasilitator Puskesmas-SLRT yang bersifat operasional, kontekstual, dan membutuhkan pengambilan keputusan di lapangan. Pelatihan saja sering kali belum cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi fasilitator, seperti variasi kasus kemiskinan, keterbatasan jejaring layanan, dan dinamika koordinasi lintas sektor (Kardeti *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pendampingan diperlukan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan kondisi riil di desa dan kelurahan.

Pendekatan pelatihan yang dikombinasikan dengan pendampingan berkelanjutan memiliki keunggulan dibandingkan pelatihan satu kali, karena memungkinkan proses refleksi, perbaikan, dan penguatan praktik pelayanan secara bertahap. Pelatihan berbasis kebutuhan lapangan yang diikuti pendampingan mampu meningkatkan pemahaman peran, kepercayaan diri, serta kualitas layanan fasilitator secara lebih konsisten (Paramita & Setyowati, 2024; Saufi *et al.*, 2025). Dalam konteks Puskesmas-SLRT, pendekatan berkelanjutan ini menjadi relevan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fasilitator sekaligus mendorong penguatan fungsi kelembagaan Puskesmas-SLRT di tingkat lokal.

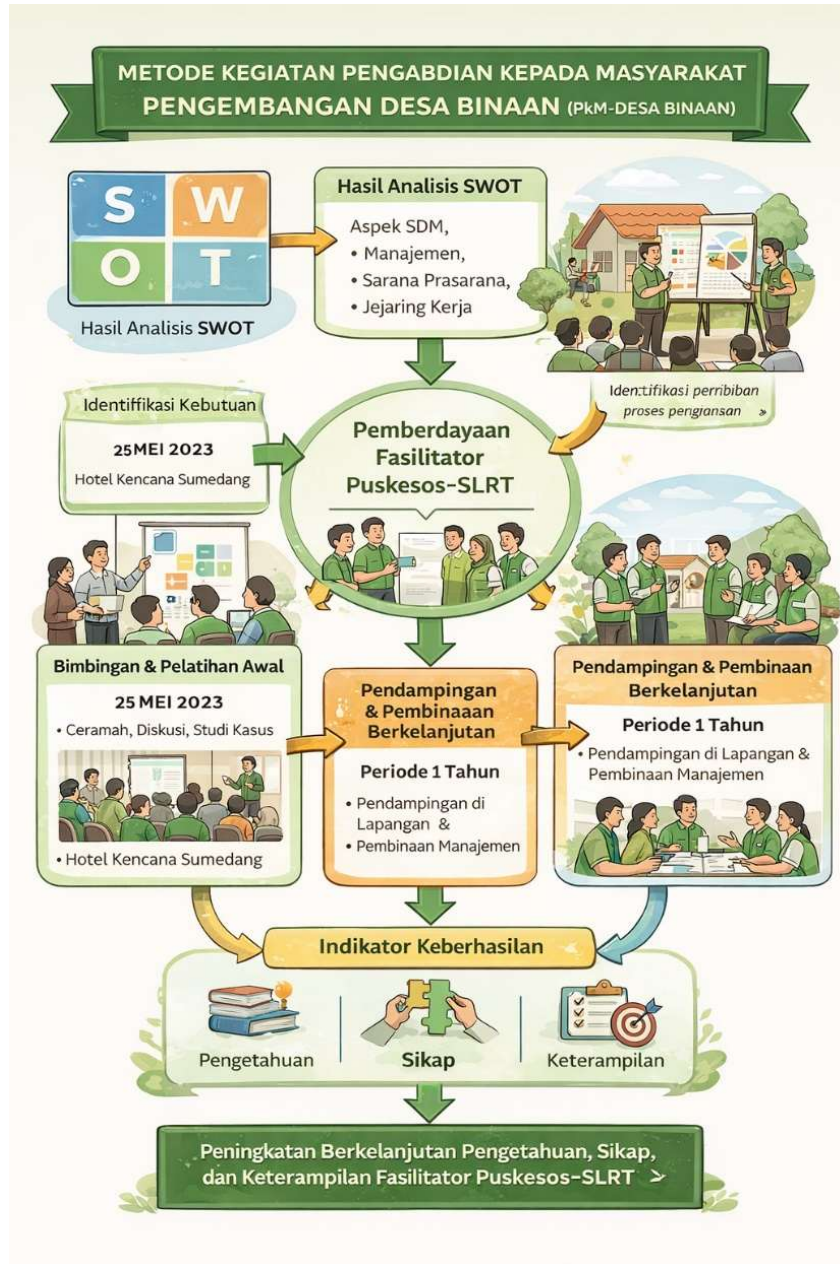
Penguatan Manajemen Organisasi dan Jejaring Kerja

Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, penguatan manajemen organisasi Puskesmas-SLRT diarahkan pada aspek-aspek praktis yang langsung memengaruhi kinerja layanan, seperti kejelasan pembagian peran fasilitator, penyusunan alur pelayanan dan rujukan, serta mekanisme koordinasi internal di tingkat desa dan kelurahan. Intervensi difokuskan pada peningkatan kemampuan fasilitator dalam mengelola aktivitas layanan secara terencana dan terdokumentasi, sehingga Puskesmas-SLRT tidak hanya berfungsi sebagai tempat penerimaan aduan, tetapi sebagai unit layanan yang aktif dan responsive (Murni & Setiawan, 2022).

Selain itu, kegiatan pengabdian ini menekankan penguatan jejaring kerja lintas sektor melalui pemetaan aktor layanan sosial yang relevan dan pengembangan mekanisme rujukan yang operasional. Jejaring yang dibangun tidak berhenti pada kesepakatan normatif, tetapi diuji melalui praktik koordinasi antara Puskesmas-SLRT dengan perangkat daerah, lembaga sosial, dan mitra pendukung lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Tampubolon (2026) yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, sekaligus memastikan bahwa jejaring tersebut berfungsi nyata dalam mendukung penyelesaian kasus sosial di tingkat lokal.

METHODS

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam skema Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan (PkM-Desa Binaan) dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sistematis dan partisipatif. Fasilitator Puskesmas-SLRT diposisikan sebagai subjek utama melalui pelibatan aktif dalam identifikasi kebutuhan, pembelajaran berbasis kasus lapangan, pelatihan, serta pendampingan dan refleksi berkelanjutan, dengan tujuan memperkuat kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar terinternalisasi dalam praktik pelayanan sosial sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menekankan penguatan kapasitas individu dan kelembagaan melalui pembelajaran partisipatif dan mentoring sebagai dasar peningkatan kinerja dan keberlanjutan program sosial (Harinuridin *et al.*, 2025; Meifiana *et al.*, 2025).



Gambar 2. Gambaran Alur Metode Kegiatan Pengabdian di Kabupaten Sumedang
Sumber: Rekontruksi Penulis 2025

Gambar 2 merupakan alur metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan fasilitator Puskesmas-SLRT yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses dimulai dari analisis kebutuhan dan pelatihan awal, dilanjutkan dengan pendampingan serta pembinaan, hingga evaluasi capaian berupa peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan fasilitator.

Metode pengabdian dirancang berdasarkan hasil Analisis SWOT yang menunjukkan adanya kelemahan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana prasarana, dan jejaring kerja fasilitator Puskesmas-SLRT di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, metode yang digunakan meliputi kegiatan bimbingan, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kegiatan ini melibatkan seluruh fasilitator Puskesmas-SLRT yang berasal dari 277 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga teknik penentuan sasaran menggunakan total sampling.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian mengacu pada model pelatihan Treadway Parker yang menekankan proses pembelajaran bertahap dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemberian materi, hingga pendampingan penerapan di lapangan. Pelatihan awal dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Kencana Sumedang, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Materi pelatihan disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan studi kasus yang disesuaikan dengan kebutuhan fasilitator Puskesmas-SLRT.

Setelah pelaksanaan pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan pembinaan berkala selama kurun waktu satu tahun. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan layanan Puskesmas-SLRT di masing-masing desa dan kelurahan. Pembinaan dilakukan untuk memperkuat aspek manajemen organisasi, koordinasi layanan, serta pengembangan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait.

Keberhasilan kegiatan pengabdian dinilai secara kualitatif melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan fasilitator Puskesmas-SLRT setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan pengetahuan dilihat dari pemahaman fasilitator terhadap peran, fungsi, dan alur layanan Puskesmas-SLRT melalui diskusi evaluasi dan refleksi peserta. Perubahan sikap dinilai dari keaktifan, inisiatif, dan komitmen fasilitator selama proses pendampingan yang diamati secara langsung. Sementara itu, peningkatan keterampilan dinilai dari kemampuan fasilitator dalam melakukan asesmen kasus, menyusun rujukan layanan, serta membangun koordinasi dan jejaring kerja di tingkat lokal. Kegiatan dinyatakan berhasil apabila ketiga aspek tersebut menunjukkan peningkatan secara konsisten selama pelaksanaan pengabdian.

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis Desa Binaan yang dilaksanakan bagi seluruh fasilitator Puskesmas-SLRT di 277 desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Landasan hukum ini menjadi pijakan utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan menghasilkan luaran berupa meningkatnya kualitas pendataan dan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui proses ini, fasilitator Puskesmas-SLRT tidak hanya melakukan pendataan administratif, tetapi juga mampu menghasilkan basis data yang lebih komprehensif, mencakup kondisi awal permasalahan sosial, kebutuhan PPKS, serta potensi intervensi layanan yang dapat diberikan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana program dan penganggaran pelayanan sosial di tingkat desa dan kabupaten.

Hasil penelusuran data hingga akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah populasi PPKS di Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencapai 7.126 jiwa, dengan kelompok terbesar berasal dari korban bencana, penyandang disabilitas terlantar, dan lanjut usia terlantar. Selain itu, terdapat pula populasi PPKS di luar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dengan jumlah signifikan, khususnya pada kategori fakir miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi. Data ini, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2** dan **Tabel 3**, menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi serta menegaskan urgensi penguatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT dalam melakukan deteksi dini dan penanganan masalah sosial secara tepat sasaran.

Pemanfaatan data PPKS yang mutakhir menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian, karena fasilitator menunjukkan peningkatan kepekaan terhadap permasalahan sosial di wilayah binaannya. Fasilitator tidak hanya mampu mengidentifikasi kelompok rentan, tetapi juga lebih siap dalam merumuskan solusi pelayanan kesejahteraan sosial yang realistis dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan tugas fasilitator Puskesmas-SLRT di bawah koordinasi Dinas Sosial, yaitu membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kemampuan fasilitator dalam memanfaatkan inovasi layanan berbasis teknologi, khususnya melalui aplikasi Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat atau SIPESAT. Aplikasi ini memungkinkan fasilitator untuk mendeteksi permasalahan sosial secara lebih cepat, melakukan pelaporan terintegrasi, serta mempercepat proses rujukan layanan. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, termasuk melalui kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, terbukti meningkatkan keandalan fasilitator dalam mengelola sistem tersebut.

Dari sisi kesesuaian dengan kondisi masyarakat, kegiatan pengabdian ini memiliki keunggulan pada pendekatan berkelanjutan melalui pendampingan jangka panjang, sehingga perubahan tidak hanya bersifat sementara. Namun demikian, terdapat pula beberapa keterbatasan, antara lain perbedaan tingkat kemampuan awal fasilitator serta keterbatasan sarana pendukung di beberapa desa yang mempengaruhi kecepatan implementasi hasil pelatihan. Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan terutama terletak pada upaya menjaga konsistensi pendampingan bagi jumlah sasaran yang besar dan wilayah yang luas.

Meskipun demikian, peluang pengembangan ke depan masih terbuka lebar, terutama melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan sosial.

Tabel 1. Populasi PPKS

No	Uraian	Populasi	Keterangan
1	Penyandang disabilitas terlantar	782	Sumber data dari aplikasi SIMPD
2	Anak terlantar	317	
3	Lanjut usia terlantar	736	
4	Gelandangan dan pengemis	8	
5	Penanganan korban bencana	5.283	
Jumlah		7.126	

Sumber: Julaeha dalam Standar pelayanan minimal bidang sosial. Materi pelatihan Fasilitator Puskesmas-SLRT, Sumedang, 2023

Berdasarkan hasil pendataan dan pemutakhiran yang dilakukan oleh fasilitator, **Tabel 2** menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial mencapai 7.126 jiwa. Kelompok PPKS terbesar berasal dari korban bencana sebanyak 5.283 jiwa, disusul penyandang disabilitas terlantar sebanyak 782 jiwa, lanjut usia terlantar sebanyak 736 jiwa, anak terlantar sebanyak 317 jiwa, serta gelandangan dan pengemis sebanyak 8 jiwa. Data ini mencerminkan tingginya kebutuhan layanan sosial yang memerlukan ketepatan asesmen dan koordinasi lintas sektor oleh fasilitator Puskesmas-SLRT.

Tabel 2. Populasi PPKS di Luar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

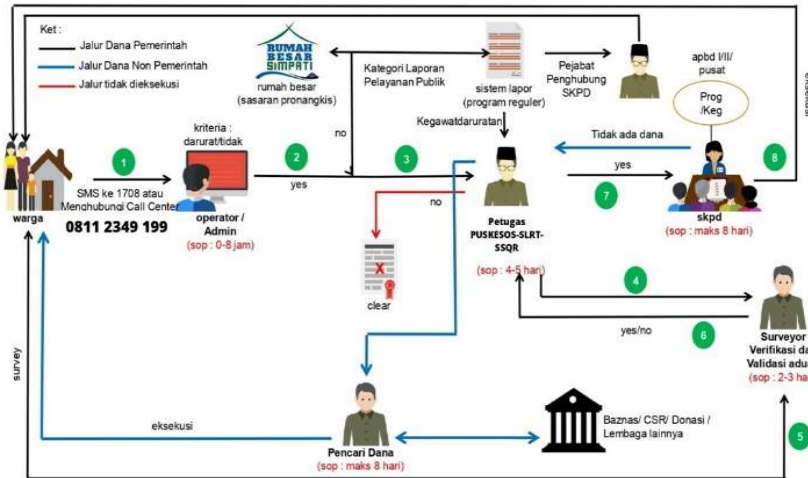
No	Uraian	Populasi
1	Anak bayi terlantar	1
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	16
3	Anak jalanan	0
4	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	70
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah	1
6	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1
7	Tuna susila	20
8	Pemulung	0
9	Kelompok minoritas	20
10	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	34
11	Orang dengan HIV/AIDS	1
12	Korban NAPZA	1
13	Korban Trafficking	1
14	Korban tindak kekerasan	52
15	Pekerja migran bermasalah	0
16	Korban bencana sosial	0
17	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	8.211
18	Fakir miskin	58.863
19	Keluarga bermasalah sosial-psikologis	0
20	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2.770

Sumber: Julaeha dalam Standar pelayanan minimal bidang sosial. Materi pelatihan Fasilitator Puskesmas-SLRT, Sumedang, 2023

Selain PPKS yang termasuk dalam SPM, Tabel 3 memperlihatkan populasi PPKS di luar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dengan jumlah yang signifikan. Kelompok fakir miskin tercatat sebanyak 58.863 jiwa, perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) sebanyak 8.211 jiwa, serta komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.770 jiwa. Keberadaan kelompok PPKS di luar SPM ini menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial di Kabupaten Sumedang dan menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fasilitator dalam melakukan deteksi dini, penentuan prioritas layanan, serta perumusan rujukan yang tepat sasaran.

Pemanfaatan data PPKS sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2** dan **Tabel 3** menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian. Fasilitator menunjukkan peningkatan kemampuan dalam tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memanfaatkan data tersebut sebagai dasar analisis permasalahan sosial di wilayah binaannya. Hal ini selaras dengan tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fasilitator dalam memahami karakteristik PPKS serta menyusun solusi pelayanan yang realistis dan kontekstual.

Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan menghadirkan aplikasi SIPESAT untuk dapat mendeteksi dengan cepat permasalahan sosial dan dapat dicarikan solusinya sesegera mungkin. Selain itu, guna semakin meningkatkan keandalan para fasilitator yang bertanggung jawab untuk turut mengelola SIPESAT tersebut, melalui bantuan kerja sama instansi seperti Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, dilakukanlah pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan.



Gambar 3. Alur Kerja Inovasi SIPESAT

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, diakses dari <https://dinsos.sumedangkab.go.id/>*

Peningkatan kinerja fasilitator juga tercermin dari pemanfaatan inovasi layanan berbasis teknologi melalui aplikasi SIPESAT. Alur kerja SIPESAT sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 2** menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelaporan, koordinasi, dan rujukan layanan sosial. Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, fasilitator menjadi lebih mampu menggunakan SIPESAT untuk mendeteksi permasalahan sosial secara lebih cepat, melakukan pelaporan terintegrasi, serta mempercepat proses rujukan kepada instansi terkait. Dampak penggunaan SIPESAT terlihat pada meningkatnya responsivitas layanan dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan bagi Para Fasilitator Puskesos-SLRT

Sumber: *Dokumentasi Penulis 2023*

Kegiatan pelatihan awal yang dilaksanakan pada 25 Mei 2023, sebagaimana didokumentasikan pada **Gambar 4**, memperlihatkan keterlibatan aktif fasilitator dalam proses pembelajaran melalui metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Keterlibatan aktif ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pendampingan dan pembinaan selama satu tahun berikutnya. Selama proses pendampingan, fasilitator menunjukkan peningkatan sikap profesional, inisiatif dalam penanganan kasus, serta komitmen dalam menjalankan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan kesejahteraan sosial.

Meskipun kegiatan ini menghadapi keterbatasan berupa perbedaan kemampuan awal fasilitator dan keterbatasan sarana pendukung di beberapa desa, pendekatan pendampingan berkelanjutan memungkinkan proses penguatan kapasitas dilakukan secara bertahap dan adaptif. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan pengabdian tercapai, ditandai dengan meningkatnya kualitas pendataan PPKS, optimalisasi pemanfaatan SIPESAT, serta penguatan peran fasilitator Puskesos-SLRT dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang.

Discussion

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT melalui pendekatan integratif berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan memberikan dampak nyata terhadap kualitas penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan (Lutfiana, 2025). Peningkatan ini tidak hanya terlihat pada aspek teknis pendataan dan pemanfaatan aplikasi layanan sosial, tetapi juga pada perubahan cara pandang fasilitator dalam memahami permasalahan sosial secara lebih komprehensif dan berbasis data (Aritonang & Trimurni, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia mampu menjawab permasalahan utama yang sebelumnya teridentifikasi melalui analisis SWOT, khususnya pada aspek kapasitas SDM dan manajemen layanan sosial (Fonataba *et al.*, 2024).

Pemanfaatan data populasi PPKS yang lebih mutakhir dan terstruktur memperlihatkan bahwa fasilitator semakin berperan sebagai agen analisis sosial di wilayah binaannya (Sukoco, 2021). Data tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program dan penganggaran pelayanan sosial di tingkat desa dan kabupaten (Al Giffari & Sukarno, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa kualitas data sosial yang baik berpengaruh langsung terhadap ketepatan sasaran kebijakan kesejahteraan sosial (Herlinda *et al.*, 2025).

Dari sisi inovasi layanan, penerapan aplikasi SIPESAT menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi pelayanan sosial (Yesnat & Widowati, 2025). Kemampuan fasilitator dalam mengoperasikan dan mengelola sistem ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan lapangan yang disertai pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan adaptasi terhadap teknologi pelayanan publik (Kurniawan & Nasution, 2025). Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan inovasi layanan sosial digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelolanya (Handrian & Novita, 2025).

Namun demikian, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pengabdian belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah intervensi. Perbedaan kapasitas awal fasilitator serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa desa menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi hasil kegiatan (Dwiansyah *et al.*, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu diiringi dengan dukungan kelembagaan, kebijakan, dan infrastruktur agar dampak pengabdian dapat berlangsung secara berkelanjutan (Ashari *et al.*, 2025). Temuan ini menjadi pembeda sekaligus kontribusi kegiatan pengabdian ini dibandingkan pengabdian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan aspek pelatihan tanpa pendampingan jangka panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat strategis bagi penguatan peran Puskesmas-SLRT sebagai *single window service* dalam pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat lokal (Amami *et al.*, 2025). Pembahasan ini menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan dengan pendampingan berkesinambungan lebih efektif dibandingkan pelatihan satu kali, terutama dalam konteks wilayah dengan kompleksitas permasalahan sosial yang tinggi seperti Kabupaten Sumedang (Maulana *et al.*, 2025). Dengan demikian, hasil pengabdian ini memiliki implikasi praktis bagi pengembangan model peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT di daerah lain dengan karakteristik serupa.

CONCLUSION

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam skema Desa Binaan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan fasilitator Puskesmas-SLRT sebagai subjek utama kegiatan efektif dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan fasilitator. Pelibatan aktif fasilitator sejak tahap identifikasi kebutuhan, pelatihan berbasis kasus lapangan, hingga pendampingan berkelanjutan mendorong proses pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, sehingga peningkatan kapasitas tidak hanya bersifat konseptual, tetapi terinternalisasi dalam praktik pelayanan sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Metode pengabdian yang dirancang berdasarkan analisis SWOT, serta dilaksanakan melalui pelatihan awal yang dilanjutkan dengan pendampingan dan pembinaan selama satu tahun, terbukti mampu menjawab permasalahan utama Puskesmas-SLRT di Kabupaten Sumedang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan fasilitator dalam pendataan dan pemutakhiran data PPKS, asesmen kasus, penyusunan rujukan layanan, serta pemanfaatan inovasi layanan berbasis teknologi melalui aplikasi SIPESAT. Temuan ini menegaskan bahwa model penguatan kapasitas yang bersifat bertahap dan berkesinambungan lebih efektif dibandingkan pendekatan pelatihan satu kali.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil memperkuat peran fasilitator Puskesmas-SLRT sebagai penghubung layanan kesejahteraan sosial (*single window service*) di tingkat lokal, yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan membaiknya koordinasi lintas sektor. Meskipun masih terdapat tantangan berupa perbedaan kapasitas awal fasilitator dan keterbatasan sarana di beberapa wilayah, hasil pengabdian ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan model peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT di daerah lain dengan karakteristik permasalahan sosial yang serupa.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis juga menegaskan bahwa seluruh data, analisis, dan isi artikel ini merupakan karya asli penulis dan bebas dari unsur plagiarisme. Artikel ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan model peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas-SLRT berbasis pemberdayaan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi kegiatan pengabdian serupa di daerah lain dengan karakteristik permasalahan sosial yang sejenis.

REFERENCES

- Abd Fatah, R. (2024). Peningkatan kapasitas (capacity building) badan pengawasan obat dan makanan Sofifi Maluku Utara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 2267-2273.
- Al Giffari, M. G. Q., & Sukarno, D. (2024). Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 154-169.
- Amami, N. K., Pranajaya, I. K., & Trisna, N. M. S. W. (2025). Implementasi tema sanctuary dan konsep wellness berbasis Evidence-Based Design (EBD) sebagai strategi inovatif dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: studi kasus di Puskesmas 1 Baturiti, Tabanan, Bali. *Waca Cipta Ruang*, 11(1), 32-41.
- Aminudin, N., Aprilia, F., Wicaksono, S. B., & Ardhy, F. (2025). Inovasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bersahaja di Kabupaten Pringsewu: evaluasi dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. *Jurnal Fasikom*, 15(1), 40-48.
- Aritonang, P. A. R., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan data peserta program keluarga harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1399-1410.
- Ashari, R., Arum, H. F. S., Nabila, F., Amalina, F. N., Wulan, T. R., Nugroho, H. S., & Dasril, M. A. (2025). Optimalisasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan potensi dan mutu desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2102-2108.
- Dwiansyah, A., Putri, S. A. E., Cahyani, A., Agustina, A., Apriani, G., Pernandes, J., & Lestari, R. P. (2024). Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Arum Dusun 1. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5444-5453.
- Fonataba, Y., Hombore, E., Nathan, I. A., & Konorop, S. Y. (2024). Penguatan kapasitas manajemen sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja masyarakat di lingkungan kampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(2), 76-86.
- Handrian, E., & Novita, M. (2025). Adopsi inovasi kebijakan digital yang inklusif: studi kasus aplikasi SIPINTAR PEDULI di Kota Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 105-119.
- Harinurdin, E., Laksono, B. S., Kusumastuti, R., & Safitri, K. A. (2025). Community empowerment utilizing open innovation as a sustainable village-owned enterprise strategy in Indonesia: a systematic literature review. *Sustainability*, 17(8), 1-30.

- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Elsi, M. (2025). Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1), 1708-1722.
- Kardeti, D., Rusmana, A., Susanto, E., & Pratiwi, D. A. G. (2021). Faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial terpadu di daerah otonom Jawa Barat, Indonesia. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kelompok dan Komunitas*, 1(1), 77-92.
- Kurniawan, I., & Nasution, I. (2025). Transformasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis digital: studi kasus aparat sipil negara pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri. *Governance: Journal of Public Management*, 1(1), 17-27.
- Laili, N. (2025). Adaptive governance dalam pengembangan kapasitas perangkat desa (studi di Desa Kendang Dukuh Kecamatan Wonorejo). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 375-385.
- Lutfiana, L. (2025). Sinergi pendampingan ekonomi, kesehatan, dan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lekor Janapria. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(3), 60-65.
- Maulana, A., Fauzi, L. M., & Kurnia, D. (2025). Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah oleh pemerintah desa melalui digitalisasi di Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Meifiana, S., Siregar, H., & Ganiadi, M. (2025). Praktik pekerjaan sosial: PKK sebagai agen kesejahteraan masyarakat di RW 05 Kelurahan Malaka Sari. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 226-246.
- Murni, R., & Setiawan, H. H. (2022). Pengaruh kompetensi petugas sistem layanan dan rujukan terpadu terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 1-15.
- Nofriyanti, L., & Mubarak, A. (2024). Efektivitas implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabiduk Sadayung di Kota Pariaman. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1-12.
- Paramita, S. G. D., & Setyowati, E. (2024). Peran fasilitator pendamping terhadap pengembangan usaha nasabah prasejahtera BTPN Syariah. *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 110-117.
- Rahayu, U., Asim, A., & Puspitasari, A. (2025). Analisis inovasi pelayanan publik digital, LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan. *Journal of Agricultural and Rural Economy*, 1(2), 31-39.
- Rusli, R., Badaruddin, B., & Firman, A. (2023). Pengaruh penerapan SLRT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2(2), 212-224.
- Salsadila, N., & Irman, A. A. J. G. (2025). Penyusunan standar pelayanan pada Puskesmas SLRT Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam rangka peningkatan kualitas layanan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 441-456.
- Saufi, M., Rizqina, S., & Cahya, N. (2025). Transformasi budaya Bapukung: dari kearifan lokal menuju strategi efektif dalam pemberdayaan dan manajemen peran ganda ibu rumah tangga. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(12), 2807-2817.
- Sukoco, D. H. (2021). Efektivitas pusat kesejahteraan sosial "As Salam" Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 18-36.
- Tampubolon, J. (2026). Transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik untuk penguatan pilar-pilar sosial di era disrupsi. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 11-23.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(7), 1323-1332.
- Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan masyarakat Banjar Gemeh melalui sosialisasi dan pendampingan administrasi kependudukan, jaminan sosial, dan layanan pos pengaduan. *Journal of Community Research & Engagement*, 2(2), 102-111.
- Yesnat, T. F., & Widowati, N. (2025). Analisis inovasi layanan aplikasi Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan (SI D'NOK) di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 183-196.
- Zubaidi, A., & Syafakhorrahman, M. (2024). Peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan era digital melalui capacity building. *Sinar: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat*, 1(1), 87-94.